

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH UNTUK
MENINGKATKAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

MAULIDY SETIAWAN

NPP. 30.0953

Asdaf Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Program Studi Keuangan Publik

Email: setiawanmaulidy@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Eko Budi Lestari, S.E, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of low regional original income compared to transfer funds. **Objective:** The purpose of this research is to find out how the regional financial independence of South Barito Regency is. **Method:** This study uses qualitative methods and analyzes the calculation of the ratio of decentralization, regional dependence, regional independence, and effectiveness according to Mahmudi Theory. Data collection techniques were carried out by observation, in-depth interviews (4 informants), and documentation. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that South Barito Regency cannot be said to be independent because its regional income is still dominated by Transfer Funds. This is also supported by the calculation of the ratio which shows the results of the ratio measurement obtained with the average results of 5 years of South Barito Regency budget, namely the Degree of Decentralization Ratio of 7.7% on the Criterion of Very Less. Furthermore, the financial independence ratio is 8.37% in the Instructive criteria with very low financial capacity. Finally, the Regional Dependence Ratio is at 90.62% which is included in the very high criteria. This is caused by internal and external inhibiting factors including institutions, regulations, data that have not been updated, natural resources, technology, characteristics of taxpayers, geographical conditions, and the COVID-19 pandemic. **Conclusion:** South Barito Regency cannot be said to be independent in terms of financially because it still depends on transfers from the center. For this reason, researchers suggest that regional governments increase their own regional income by overcoming existing obstacles and increasing tax supervision, optimizing public services and new innovations in tax payments, for example using tapping boxes. So that local revenue can be maximized.

Keywords: Participation; Youth Generations; Lorong Literasi Gowa Programs

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan rendahnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan dana transfer **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kemandirian keuangan daerah Kabupaten Barito Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis perhitungan rasio desentralisasi, ketergantungan daerah, kemandirian daerah, serta efektivitas menurut Teori Mahmudi. Teknik pengumpulan data

dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam (4 informan), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu Kabupaten Barito Selatan belum bisa dikatakan mandiri karena Pendapatan daerahnya masih didominasi dengan Dana Transfer. Hal tersebut juga didukung dengan perhitungan rasio yang menunjukkan Hasil pengukuran Rasio yang didapat dengan rata-rata hasil dari 5 tahun anggaran Kabupaten Barito Selatan yaitu Rasio Derajat Desentralisasi sebanyak 7,7% pada kriteria Sangat Kurang. Selanjutnya rasio kemandirian keuangan sebanyak 8,37% pada kriteria Instruktif dengan kemampuan keuangan rendah sekali. Terakhir Rasio Ketergantungan Daerah pada angka 90,62% yang masuk dalam kriteria sangat tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh faktor penghambat internal dan eksternal diantaranya kelembagaan, regulasi, data yang belum diperbarui, sumber daya alam, teknologi, sifat-sifat wajib pajak, kondisi geografis, serta pandemic COVID-19. **Kesimpulan:** Kabupaten Barito Selatan belum bisa dikatakan mandiri secara finansial karena masih bergantung pada dana transfer dari pusat Untuk itu peneliti menyarankan agar pemerintah daerah meningkatkan lagi pendapatan asli daerahnya dengan cara mengatasi hambatan yang ada serta meningkatkan pengawasan pajak, optimalisasi pelayanan publik dan inovasi baru dalam pembayaran pajak contohnya menggunakan tapping box. Agar pendapatan asli daerah dapat dimaksimalkan.

Kata kunci: Decentralization, Local Original Revenue, Financial Independence

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sudah mengalami perkembangan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahannya ditandai dengan adanya Otonomi daerah yang diharapkan masing masing daerah dapat mengatur daerahnya selaras dengan potensi daerahnya sendiri. Otonomi daerah sendiri merupakan hak, kewajiban dan wewenang suatu daerah guna mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat daerahnya masing masing namun masih tetap pada batasan tertentu yang diatur dalam undang-undang. Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk daerah itu sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian daerah otonom tersebut.

Setiap daerah tentunya berlomba-lomba untuk mengelola keuangannya dengan baik dengan cara menggunakan dana yang didapat dari sumber pendapatan daerah dengan baik, tertib, efisien dan efektif. Sumber pendapatan berasal dari Dana Transfer, Pendapatan Asli Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Permasalahan muncul ketika suatu daerah bergantung terhadap pemerintah pusat yang menyebabkan pemerintah daerah menjadi mengharapakan dana transfer dari pemerintah pusat untuk belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah yang belum mampu memenuhi kebutuhan daerah sehingga mengakibatkan pemerintah daerah belum bisa dikatakan mandiri dan masih bergantung pada pemerintah pusat.

Untuk menunjang kemandirian daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan mensejahterakan masyarakat maka diperlukan dana yang memadai. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Barito Selatan harus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya agar pendapatan daerah semakin meningkat dan dapat memenuhi kebutuhan belanja pemerintahannya dalam melaksanakan urusan pemerintahan tanpa adanya bantuan dari pusat.

Permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Barito Selatan ialah potensi keuangan daerah yang masih belum tergali secara optimal. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Barito Selatan masih tergantung dengan besaran dana dari pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah kabupaten Barito Selatan ketergantungannya masih sangat relatif tinggi dikarenakan pendapatan transfer yang masih mendominasi.

Adanya permasalahan ketergantungan daerah terhadap dana dari pemerintah pusat memberikan pandangan masyarakat bahwa pemerintah daerah tidak dapat mengoptimalkan potensi daerah dengan baik karena pendapatan asli daerah yang sangat kecil dibandingkan dengan dana transfer.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan yang diantaranya adalah permasalahan terkait dana transfer yang sangat mendominasi dalam APBD termasuk juga potensi daerah yang belum tergali secara maksimal. Tentunya hal tersebut harus segera diatasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar tidak bergantung pada dana transfer. Berikut adalah tabel perbandingan antara dana transfer dan pendapatan asli daerah

Tabel 1

Perbandingan antara Dana Transfer dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Selatan tahun 2018-2022

Tahun	Dana Transfer (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Perbandingan
2018	796.899.436.000,00	72.421.660.169,97	11 : 1
2019	794.879.234.000,00	90.559.767.693,00	8,8 : 1
2020	801.648.332.000,00	63.640.256.337,80	12,6 : 1
2021	844.515.417.588,00	95.778.093.408,00	8,8 : 1
2022	979.064.635.151,00	98.065.794.810,13	9,9 : 1

Sumber: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Barito Selatan tahun anggaran 2018–2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dana transfer jauh lebih mendominasi dibandingkan pendapatan asli daerah perbandingan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yang mungkin terjadi akibat adanya COVID-19.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Selatan mengalami peningkatan walaupun kurang signifikan maka pemerintah daerah harus memperhatikan jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Selatan mengenai kontribusi dari masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah karena Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah sangatlah kecil.

Tabel 2

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2018	72.421.660.169,97	996.697.830.595,81	7,2
2019	90.559.767.693,00	1.022.489.791.152,92	8,85
2020	63.640.256.337,80	941.156.020.690,77	6,76
2021	95.778.093.408,00	968.382.077.703,00	9,89
2022	98.065.794.810,13	1.084.477.113.908,13	9,04

Sumber: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Barito Selatan tahun anggaran 2018–2022

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi atau naik turun terhadap total Pendapatan Daerah. Kontribusi tersebut bisa dikatakan sangatlah kecil karena kurang dari 10%.

Berkaitan dengan itu dalam melaksanakan pemerintahan daerah tentunya daerah harus melakukan belanja agar mencukupi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Namun dengan Pendapatan Daerah yang rendah tentunya akan menyulitkan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Berikut kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total belanja Kabupaten Barito Selatan 2018-2022

Tabel 3

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan asli daerah (Rp)	Belanja daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2018	72.421.660.169,97	1.093.159.408.553,40	6,62
2019	90.559.767.693,00	609.891.775.180,92	14,85
2020	63.640.256.337,80	1.092.975.629.266,12	5,82
2021	95.778.093.408,00	1.037.370.053.194,00	9,23
2022	98.065.794.810,13	1.093.725.173.615,00	8,96

Sumber: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Barito Selatan tahun anggaran 2018–2022

Dapat dilihat dalam tabel bahwa dalam 5 tahun terakhir hanya dibawah 15% saja yang bisa dibiayai oleh pemerintahan daerah sendiri. Maka dari itu pemerintah daerah memerlukan dana tambahan yaitu Dana Transfer untuk menutupi kekurangan belanja daerah masing-masing.

Dengan adanya permasalahan tersebut membuat Kabupaten Barito Selatan menjadi tergantung pada Pemerintah pusat dalam hal finansialnya maka dari itu diperlukan analisis terhadap Pendapatan Asli Daerah berupa perhitungan dalam mengukur kemandirian daerah dengan menggunakan perhitungan Rasio Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Barito Selatan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yaitu penelitian tentang Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Studi Kasus: Provinsi Banten tahun 2011-2015 yang dilakukan Tarnoto & Joko Tri Haryanto, Penelitian ini menggunakan Deskriptif Kuantitatif, metode analisis menggunakan analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, efektifitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Daerah-daerah di Banten dalam aspek kemandirian keuangan sudah memuaskan dilihat dari rata-rata memiliki pola partisipatif, Adanya ketimpangan antara daerah dilihat dari derajat desentralisasi. Ada 4 daerah yang memiliki derajat desentralisasi tinggi sedangkan 3 lainnya masih minim, Seluruh daerah di banten memiliki efektifitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah maupun pajak daerah di atas 100%. Penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung yang dilakukan Nyoman Trisna Erawati & Leni Suzan. Pada proses penelitian ini menggunakan metode analisis model regresi linier berganda dengan sumber data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran kota yaitu Laporan Realisasi Anggaran kota Bandung pada periode 2009 -2013 sebagai dasarnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan Retribusi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, begitupula dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sama halnya dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak

memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Selanjutnya ada penelitian Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2010-2014 yang dilakukan Dwi Purnamasari & Isna Rodiyah tahun 2017. Penelitian ini dalam proses penelitiannya menggunakan metode campuran sehingga memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian, serta kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hasil dari penelitian ini yaitu setelah dilakukan perhitungan rasio menunjukkan bahwa kabupaten sidoarjo memiliki status kemandirian yang masih rendah yaitu berada pada pola hubungan konsultatif. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terbilang rendah. Kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah menjadi pengaruh penting dalam menunjang kemandirian keuangan daerah. Penelitian Efektivitas Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang dilakukan oleh Septariani tahun 2019. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan pengumpulan data yaitu Studi Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Hasil penelitian Kabupaten Musi Banyuasin secara rata-rata efektivitas dan kemandirian daerah masih kurang. Kabupaten Musi Banyuasin masih belum mampu dalam membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintah, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Kabupaten Musi Banyuasin juga belum mampu mengupayakan sumber-sumber pendapatan asli daerah terkhusus pada pajak daerah dan retribusi daerah serta bekerjasama dengan BUMD. Penelitian Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman yang dilakukan Primahadi dan Kurniawan tahun 2021. Penelitian ini menggunakan Analisis Deskriptif Kuantitatif. Hasil Penelitian Kota Pariaman masih sangat bergantung pada pemerintah pusat terlihat dari tingkat kemandirian dengan pola hubungan instruktif. Selain itu, tingkat efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah Kota Pariaman mengalami kenaikan dan penurunan namun efektivitas dari tahun 2014 hingga tahun 2018 sudah berada di atas 100% sehingga dapat dikatakan efektif.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yang terletak pada fokus penelitian dan lokus. Berdasarkan dengan penelitian ini peneliti mengambil judul sesuai dengan permasalahan dan kesenjangan yang terjadi yaitu Analisis Pendapatan Asli Daerah untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah pada penelitian sebelumnya menggunakan metode deskriptif kuantitatif sedangkan pada penelitian ini menggunakan kualitatif. Perbedaan yang lainnya terletak pada teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan beberapa sampel dan wawancara sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif saja maka mengumpulkan informasi dan data melalui wawancara terhadap pihak terkait.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai analisis Pendapatan Asli Daerah untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi. Wawancara yang dilakukan oleh penulis menggunakan 4 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah, serta Kepala Bidang Penagihan. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan mewawancarai 4 orang informan dan dokumentasi dari arsip Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan. Penelitian ini menggunakan teori analisis rasio keuangan yang digagas oleh Mahmudi tahun 2019 yang menyatakan bahwa analisis rasio keuangan dalam mengukur kemandirian keuangan daerah menggunakan Rasio Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian Penulis menganalisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Barito Selatan dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Mahmudi. Teori tersebut terdiri dari rasio keuangan yang terdiri dari rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan daerah, dan rasio efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah. Adapun pembahasan dapat dilihat melalui subbab berikut.

3.1 Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi menggambarkan suatu kemampuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya guna membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total Pendapatan Daerah. Rasio Derajat Desentralisasi bisa didapatkan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Perhitungan tersebut dapat mengetahui bahwa derajat desentralisasi menggambarkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah dengan total Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan. Berikut perhitungan dan grafik rasio derajat desentralisasi Kabupaten Barito Selatan:

$$2018 = \frac{81.427.860.612,76}{993.055.937.843,65} \times 100\% = 8,19\% \text{ (Sangat kurang)}$$

$$2019 = \frac{77.337.581.831,24}{1.006.510.308.469,03} \times 100\% = 7,68\% \text{ (Sangat kurang)}$$

$$2020 = \frac{56.790.417.171,83}{987.379.417.289,87} \times 100\% = 5,75\% \text{ (Sangat kurang)}$$

$$2021 = \frac{97.742.354.898,43}{999.994.463.691,60} \times 100\% = 9,77\% \text{ (Sangat kurang)}$$

$$2022 = \frac{80.625.253.962,42}{1.132.020.979.985,67} \times 100\% = 7,12\% \text{ (Sangat kurang)}$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka dapat ditentukan derajat desentralisasi Kabupaten Barito Selatan. Perhitungan ini menghasilkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah. Perkembangan derajat desentralisasi Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4

Derajat Desentralisasi Kabupaten Barito Selatan 2018-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2018	81.427.860.612,76	993.055.937.843,65	8,19	Sangat Kurang
2019	77.337.581.831,24	1.006.510.308.469,03	7,68	Sangat Kurang
2020	56.790.417.171,83	987.379.417.289,87	5,75	Sangat Kurang
2021	97.742.354.898,43	999.994.463.691,60	9,77	Sangat Kurang
2022	80.625.253.962,42	1.132.020.979.985,67	7,12	Sangat Kurang

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018-2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio derajat desentralisasi Kabupaten Barito Selatan mengalami kenaikan serta penurunan. Pada tahun 2018 – 2020 terjadi penurunan yang terjadi karena pandemic COVID-19 lalu meningkat drastis pada tahun 2021 dan kembali menurun pada tahun 2022. Rasio paling rendah berada pada tahun 2020 yaitu sebesar 5,75%. Rata-rata derajat desentralisasi Kabupaten Barito Selatan dalam kurun waktu 2018-2022 berada pada presentase 7,7%.

3.2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang rendah dapat menyebabkan daerahnya semakin bergantung dengan Pemerintah Pusat dan akan berpengaruh juga dengan kemandirian keuangan daerahnya. Kemandirian Keuangan suatu daerah dapat dihitung dengan cara rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio ini dapat menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana yang berasal dari luar pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan tersebut ditentukan oleh besar kecilnya rasio perhitungan kemandirian keuangan pemerintah daerah. Jika hasil perhitungan tinggi maka menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana eksternal itu rendah. Begitupun sebaliknya, apabila hasil perhitungan rendah maka menunjukkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana yang bersumber dari luar (eksternal) pemerintah daerah. Rumus yang digunakan dalam perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut juga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah menjadi indikator utama dalam kemandirian keuangan daerah. Karena jika Pendapatan Asli Daerah rendah maka akan rendah pula tingkat kemandirian keuangan daerah. Berikut adalah perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Barito Selatan pada tahun anggaran 2018-2022:

$$2018 = \frac{81.427.860.612,76}{911.628.077.230,89} \times 100\% = 8,93\% \text{ (instruktif)}$$

$$2019 = \frac{77.337.581.831,24}{929.172.726.637,79} \times 100\% = 8,32\% \text{ (instruktif)}$$

$$2020 = \frac{56.790.417.171,83}{930.589.000.118,04} \times 100\% = 6,1\% \text{ (instruktif)}$$

$$2021 = \frac{97.742.354.898,43}{902.252.108.793,17} \times 100\% = 10,83\% \text{ (instruktif)}$$

$$2022 = \frac{80.625.253.962,42}{1.051.395.726.023,25} \times 100\% = 7,66\% \text{ (instruktif)}$$

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa penentuan kemampuan daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal ditentukan dari Besaran Pendapatan Asli Daerah terhadap Besaran Pendapatan Transfer. Berikut merupakan perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan yang disajikan dalam tabel 5.

Tabel 5
Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan 2018-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2018	81.427.860.612,76	911.628.077.230,89	8,93	Instruktif
2019	77.337.581.831,24	929.172.726.637,79	8,32	Instruktif
2020	56.790.417.171,83	930.589.000.118,04	6,1	Instruktif
2021	97.742.354.898,43	902.252.108.793,17	10,83	Instruktif
2022	80.625.253.962,42	1.051.395.726.023,25	7,66	Instruktif

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018-2022

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa presentasi tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Barito Selatan mengalami kenaikan dan penurunan. Dua tahun pertama yaitu 2018-2019 cukup stabil di kisaran 8% hingga pada tahun berikutnya menurun drastis menjadi 6,1%. Hal tersebut disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang sempat melanda di Indonesia. Selanjutnya kembali bangkit pada tahun 2021 hingga mencapai 10% dan kembali turun sebanyak 3% pada tahun 2022.

Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2018-2022 memiliki pola hubungan instruktif dan kemampuan keuangan daerah yang rendah sekali. Persentase dari Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan mengalami kenaikan serta penurunan.

3.3. Rasio Ketergantungan Daerah

Selain rasio Kemandirian Keuangan daerah dapat dihitung pula rasio ketergantungan untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pendapatan eksternal khususnya pendapatan transfer. Rasio ini hampir sama dengan rasio derajat desentralisasi namun ada perbedaan dalam hal komponen yang diukur. Pengukuran ini dapat memperkuat hasil perhitungan kemandirian keuangan daerah. Rasio ini menunjukkan seberapa besar tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan/atau provinsi. Semakin tinggi perhitungan rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat ataupun provinsi dan sebaliknya. Rumus yang digunakan dalam perhitungan rasio derajat ketergantungan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut dapat dilihat bahwa untuk mengetahui tingkat ketergantungan keuangan daerah dapat diketahui dengan melakukan perbandingan antara pendapatan transfer dengan total pendapatan, maka dari itu disinilah letak perbedaan rasio ini dengan rasio kemandirian keuangan. Rasio kemandirian keuangan lebih menekankan pada Pendapatan Asli Daerah, sementara itu rasio ini menggunakan total pendapatan. Berikut ini adalah perhitungan menggunakan rasio ketergantungan daerah Kabupaten Barito Selatan:

$$2018 = \frac{911.628.077.230,89}{993.055.937.843,65} \times 100\% = 91,8\% \text{ (Sangat tinggi)}$$

$$2019 = \frac{902.605.223.637,79}{1.006.510.308.469,03} \times 100\% = 89,67\% \text{ (Sangat tinggi)}$$

$$2020 = \frac{903.135.067.712,04}{987.379.417.289,87} \times 100\% = 91,46\% \text{ (Sangat tinggi)}$$

$$2021 = \frac{878.325.610.335,17}{999.994.463.691,60} \times 100\% = 87,83\% \text{ (Sangat tinggi)}$$

$$2022 = \frac{1.045.252.098.794,25}{1.132.020.979.985,67} \times 100\% = 92,33\% \text{ (Sangat tinggi)}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa besaran Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan dipengaruhi oleh Pendapatan Transfer dengan Total Pendapatan daerah. Perkembangan Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut.

Tabel 6

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2018	911.628.077.230,89	993.055.937.843,65	91,8	Sangat Tinggi
2019	929.172.726.637,79	1.006.510.308.469,03	89,67	Sangat Tinggi
2020	930.589.000.118,04	987.379.417.289,87	91,46	Sangat Tinggi
2021	902.252.108.793,17	999.994.463.691,60	87,83	Sangat Tinggi
2022	1.051.395.726.023,25	1.132.020.979.985,67	92,33	Sangat Tinggi

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018-2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio derajat ketergantungan Kabupaten Barito Selatan mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya atau bisa dibilang tidak stabil. walaupun perbedaan antara tiap tahunnya tidak besar hanya 2%-5% saja namun hal ini tentu saja harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah yang mana seharusnya tiap tahun akan semakin berkurang walaupun perlahan. Kenaikan terjadi di tahun 2020 yang mana pada saat itu pemerintah daerah mengalami kendala akibat dari pandemic COVID-19 yang mana mempengaruhi segala aspek pendapatan daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah sangat sedikit dan memerlukan bantuan atau dana transfer dari pemerintah pusat untu tetap dapat menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Hasil perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan rata-rata sebesar 90,62% yang mana jika dilihat dalam tabel berada dalam kategori >50% yaitu dengan kategori

sangat tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan masih sangat bergantung pada pendapatan transfer.

3.4 Rasio Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Disamping itu dalam mengukur kemandirian keuangan juga digunakan perhitungan analisis rasio efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara target Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah. Berikut Rumus Rasio Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut dapat dilihat bahwa dalam mengukur kemampuan daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan menggunakan analisis Rasio efektivitas dengan cara membandingkan antara target Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah. Berikut Hasil Perhitungan dari Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Selatan:

$$2018 = \frac{72.421.60.169,97}{81.427.860.612,76} \times 100\% = 112,44\% \text{ (Sangat efektif)}$$

$$2019 = \frac{100.859.710.040,00}{77.337.581.831,24} \times 100\% = 76,68\% \text{ (Kurang Efektif)}$$

$$2020 = \frac{87.062.560.060,00}{56.790.417.171,83} \times 100\% = 65,23\% \text{ (Tidak Efektif)}$$

$$2021 = \frac{98.513.833.880,78}{97.742.354.898,43} \times 100\% = 99,22\% \text{ (Cukup Efektif)}$$

$$2022 = \frac{98.065.794.810,13}{80.625.253.962,42} \times 100\% = 82,21\% \text{ (Kurang Efektif)}$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka dapat diketahui bahwa peneliti menentukan efektivitas dengan melakukan perbandingan antara realisasi pendapatan asli daerah dengan target pendapatan asli daerah. Hasil perhitungan Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat melalui tabel 7 berikut.

Tabel 7

Rasio Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Selatan 2018-2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2018	72.421.660.169,97	81.427.860.612,76	112,44	Sangat Efektif
2019	90.559.767.693,00	77.337.581.831,24	76,68	Kurang Efektif
2020	63.640.256.337,80	56.790.417.171,83	65,23	Tidak Efektif
2021	95.778.093.408,00	97.742.354.898,43	99,22	Cukup Efektif
2022	98.065.794.810,13	80.625.253.962,42	82,21	Kurang Efektif

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018-2022

Dari Hasil Perhitungan diatas dapat dilihat bahwa Rasio Efektivitas Kabupaten Barito Selatan mengalami kenaikan dan penurunan pada tiap tahunnya. Presentase tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebanyak 112% dan paling rendah berada pada tahun 2020 yaitu sebanyak 65% saja. Jika dilihat

dari rata-rata 5 tahun terakhir maka Rasio efektifitas berada pada angka 86,8% yang masuk dalam kriteria Kurang Efektif.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil perhitungan Derajat Desentralisasi Kabupaten Barito Selatan dengan rata rata 7,7% jika dilihat dalam skala interval berada pada skala 0,00-10,00. Dapat dibilang bahwa derajat desentralisasi Kabupaten Barito selatan masih Sangat Kurang. Dengan keadaan seperti itu dapat dikatakan bahwa Kabupaten Barito Selatan belum bisa dikatakan Mandiri dikarenakan masih sangat bergantung dengan pemerintah pusat dalam membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri

Hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Barito Selatan Jika dilihat dari rata-rata perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Barito Selatan mendapat rata-rata sebanyak 8,37% saja. Sehingga dapat diartikan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Barito Selatan berada pada skala interval Instrukturif dengan kemampuan keuangan daerah rendah sekali. Pola hubungan Instrukturif ini menandakan bahwa peran pemerintah pusat masih sangat mendominasi dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah sedangkan tingkat penggunaan dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah masih sangat rendah dan daerah ini termasuk kedalam daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah, karena belum mampu memenuhi belanja pemerintahannya.

Hasil perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan rata-rata sebesar 90,62% yang mana jika dilihat dalam tabel berada dalam kategori >50% yaitu dengan kategori sangat tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan masih sangat bergantung pada pendapatan transfer.

Hasil perhitungan Rasio Efektivitas Kabupaten Barito Selatan rata-rata berada pada angka 86,8% yang termasuk dalam kriteria Kurang Efektif. Maka dari itu Pemerintah daerah harus dapat memaksimalkan pendapatannya demi menunjang efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerahnya.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor yang menjadi penghambat dalam meningkatkan kemandirian keuangan Kabupaten Barito Selatan ada dua yaitu faktor internal dan eksternal diantaranya Kelembagaan yang mengurus Pendapatan kurang cocok, Database wajib pajak dan objek pajak masih belum update, Sumber Daya Manusia yang belum memadai, Regulasi yang masih lemah, Teknologi yang digunakan belum optimal, Kondisi Geografis, Sifat-sifat wajib pajak, Pandemi COVID-19. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya Mengusulkan Pembentukan Perangkat Daerah baru, Pemutakhiran data objek pajak, Melaksanakan diklat pelatihan dan sebagainya, Membenahi serta mengevaluasi peraturan daerah, Melakukan Kerjasama dengan pihak perbankan dan kantor pos, Mempermudah Pembayaran Pajak, Memberikan Pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya pajak, Melakukan Pemutihan dan pengurangan denda pajak.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Kabupaten Barito Selatan belum bisa dikatakan mandiri. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa perhitungan rasio yang dilakukan penulis. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam meningkatkan kemandirian keuangan Kabupaten Barito Selatan ada dua yaitu faktor internal dan eksternal diantaranya Kelembagaan yang mengurus Pendapatan kurang cocok, Database wajib pajak dan objek pajak masih belum update, Sumber Daya Manusia yang belum memadai, Regulasi yang masih lemah, Teknologi yang digunakan belum optimal, Kondisi Geografis, Sifat-sifat wajib pajak, Pandemi COVID-19. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya Mengusulkan Pembentukan Perangkat Daerah baru, Pemutakhiran data objek pajak, Melaksanakan diklat pelatihan dan sebagainya, Membenahi serta mengevaluasi peraturan daerah,

Melakukan Kerjasama dengan pihak perbankan dan kantor pos, Mempermudah Pembayaran Pajak, Memberikan Pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya pajak, Melakukan Pemutihan dan pengurangan denda pajak.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada satu lokasi yaitu di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian ini dilakukan agar menjadi bahan penelitian selanjutnya untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Barito Selatan sehingga dapat dilakukan penemuan yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah beserta jajarannya dan seluruh anggota Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Kabupaten Barito Selatan yang merupakan senior peneliti yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Erawati, Nyoman T., & Suzan, Leni. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung. *E-Proceeding of Management*, 2(3), 3259 – 3266. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/1700>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN
- Primahadi, R., & Kurniawan, R. (2021). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 84. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.312>
- Purnamasari, D., & Rodiyah, I. (2019). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2010 – 2014. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 5(1), 75. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v5i1.814>
- Septariani, J. (2019). Efektivitas Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 15, 23–33
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. Ke 3. Ed. Sofia Yustiyani Suryandari. Bandung: Alfabeta
- Tarnoto, & Haryanto, Joko T. (2018). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Studi Kasus: Provinsi Banten Tahun 2011 – 2015. *Jurnal Politik dan Kebijakan*, 5(1), 1-10 <https://doi.org/10.33626/inovasi.v15i1.22>